

Abstrak

Erupsi Merapi tahun 2010 telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat terdampak khususnya pada sektor perekonomian. Sumber daya alam hasil erupsi yang begitu melimpah mengakibatkan kegiatan pertambangan secara masif baik di daerah aliran sungai maupun di lahan pribadi. Pada perjalanannya, distribusi sumber daya alam hasil erupsi ini menjadi satu sumber konflik baru karena distribusinya yang tidak merata. Dalam konteks Desa Gunungraharja, permasalahan tersebut mengakibatkan kemunculan Kelompok Resisten yang mengiringi kepemimpinan Kepala Desa Gunungraharja. Hal ini juga terkait dengan dualisme peran yang dijalankan oleh Kepala Desa yaitu aktor formal dan aktor ekonomi yang terlibat dalam pertambangan pasir di wilayah lereng Merapi. Seiring berkembangnya masalah, inisiasi Kampung Keluarga Berencana di Dusun Subur Makmur, Desa Gunungraharja oleh Pemerintah Kecamatan menjadi episode baru bagi konflik antara Kepala Desa dan Kelompok Resisten. Kedua pihak sama-sama menggunakan Kampung KB sebagai alat untuk mencapai kepentingannya. Satu pihak untuk melawan Kepala Desa dengan cara terselubung dan diskursus berupa ketidaksesuaian nilai antara yang diajarkan leluhur dengan Program Keluarga Berencana. Pihak lainnya yaitu Kepala Desa, menggunakan Kampung KB sebagai suatu wadah untuk mengembalikan kepercayaan warganya yang mulai memudar akibat ulah dari Kelompok Resisten. Sementara itu, Kader Kampung KB terpaksa menjadi pihak ketiga dalam proses manajemen konflik di Kampung KB Subur Makmur dengan segala keterbatasannya. Hal ini dikarenakan peranan Kader Kampung KB yang harus memastikan bahwa program Kampung Keluarga Berencana berjalan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : Resistensi berlapis, cara terselubung, manajemen konflik.

Abstract

This work discusses the multi-layered resistance that is exist in a high trust of Village Chief. By interviews and observations start in 2019 in Gunung Raharja Village, Sleman Regency, the researcher found out the multi-layered resistance to Gunung Raharja Village Chief. On the surface, the resistance action seen to be collective action of anti family planning program. Author argue that the anti family planning program is a camouflage of another conflict that involving Gunung Raharja Village Chief and the minority group - later called Resistance Group. The Village Chief playing dualism role as economic actor in type C mining, and the formal actor as village chief. Furthermore, Gunung Raharja Village Chief is one of the elite in the type C mining in his administrative area. On the opposite side, the Resistance Group also work on the mining sector but they have different level with Village Chief. Considering the resources of Resistance Group, author argue that the unequal resources between them has enacting the Resistance Group to choose hidden resistance rather than openly. This way also to preserve Resistance Group from retaliation of Village Chief. They used the Family Planning Hamlet of Subur Makmur as a tool to oppose Village Chief. In this state, Resistance Group spread discourse about the discrepancy between family planning program and the values that is exist in society. The conflict also involving Family Planning Cadre of Subur Makmur as the third party to carry out the conflict management process. They had to be involved because of their function as a cadre in the family planning village program.

Keywords : Multi-layered resistance; hidden transcript; conflict management.